FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN DI MADURA

SURYANI DWI KUSWARHINI
Fakultas Ekonomi Universitas Wiraraja

Abstract

The implementation of area autonomy by central government to the local government for becoming an independence area is by arranging their area financial. Increating an independence area, the local government can adopt and implemented to upgrade their area public service on any potencial area for developing their area to become the source of area earning. In UU No 32 said that for the local government execution, the central government will checked the transfer balance fund wich consist of Public Alocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) and a part of sharing holder fund which consist of natural source and lease. Beside to check the balance fund, the local government ought to arrange their on local financial for having the great earning and for defrayal their local needs. The purpose of this research is know and measure the influence of Public Alocation Fund (DAU) and earning of Genuines Area In Province Madura, and hopes the result can give an input to central government for compilating the policy in planning, operating and evaluating the APBN and APBD, and also invite the investor covered by the government policy.

These research use the financial statement of province Madura for period 2005 – 2007 for the sample, wich consist of local expenditure, Public Alocation Fund (DAU) ang earnings of Genuiness Area (PAD), the data source is come from one of Institution in Province Madura that can give the real fund condition of Province Madura. Analysis tchnics that used in these resech is multiple regression wit SPSS 12,0 for windows.

Based on the result can conclede that the firs hypothesis wich said that Public Fun Allocation (DAU) and earning's of Genuiness Area (PAD) influence a local expenditure is truth and the second hypothesis wich said that flypaper is influenced the Public Allocation Fund (DAU) and earning of Genuiness area is also truth.

Keyword : Public Allocation Fund (DAU), Earning's of Genuiness Area (PAD), Local Expenditure

PENDAHULUAN

Manajemen pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru seiring dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal. Kebijakan terkait yang tertuang dalam UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Diharapkan dengan diberlakukannya Undang Undang ini

memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, dalam mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki untuk pembangunan pada sektor sektor produktif di daerah.

Undang Undang No 32 menyatakan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam, disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) pembiayaan dan lain lain pendapatan.

Dana Alokasi Umum yang ditransfer dari pemerintah pusat merupakan dana utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD, tujuan dari pengalokasian dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimaksudkan untuk mengurangi atau untuk menghilangkan kesenjangan fiskal yang terjadi antar pemerintah daerah dan adanya penjaminan keberlangsungan pelayanan publik

Selanjutnya, kategori pengeluaran daerah dengan fokus pada terjadinya *flypaper effect*, ditemukan pengaruh *unconditioal grant* pada kategori pengeluaran adalah lebih kuat dari pada pengeluaran untuk kebutuhan *non esensial* dari pada kebutuhan esensial dan normal seperti keamanan (Deller dan Maher, 2005 dalam Mutiara maimunah, 2006).

Berdasarkan data yang ada terlihat bahwa peranan dana perimbangan dalam APBD masih sangat besar, tingginya ketergantungan fiskal dibeberapa daerah khususnya kabupaten di Madura disebabkan tinggi derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, semua pajak utama yang paling produktif dan elastis pajak baik langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pemerintah pusat.

Pajak daerah dan retribusi daerah seyogyanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah, perbedaan potensi pajak daerah dan retribusi daerah menghasilkan perbedaan penerimaan yang selanjutnya menghasilkan pula perbedaan belanjanya. Disisi lain, perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antar pemerintah daerah tidak selalu merepresentasikan potensinya akibat persaingan pajak (*tax competition*) antar daerah, demikian pula, perbedaan belanja antar pemerintah daerah tidak selalu mencerminkan kebutuhan riil masyaraktnya akibat persaingan pengeluaran (*expenditure competition*).

Dominan peran transfer relatif terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai belanja pemerintah daerah sebenarnya tidak memberikan panduan yang baik bagi governance terhadapa aliran transfer itu sendiri. nampak Dana Alokasi Umum merupakan dana perimbangan yang sangat

besar dalam pembiayaan daerah yang hampir mencapai 80% dari keselurah pendapatan dan besaran dari Dana Perimbangan dari pemerintah pusat penggunaannya diserahkan kepada pemerintah daerah tanpa adanya alokasi penggunaan sehingga dana perimbangan dari pemerintah pusat ini menimbulkan pengalokasian belanja yang tidak sesuai, hal ini berarti pemerintah daerah lebih berhati hati dalam menggunakan dana yang digali dari masyarakat dari pada dan transfer dari pemerintah pusat.

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang diajukan adalah

1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah pada Kabupaten di Madura ?
2. Apakah terjadi *flypaper effect* pada pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada Kabupaten di Madura ?
3. Apakah *flypaper effect* cenderung menyebabkan peningkatan jumlah belanja daerah pada Kabupaten di Madura ?

KAJIAN TEORI

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau secara spesifik dikenal perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi sehingga mampu membiayai pembangunannya.

Flypaper Effect

Hamilton (1983, Haryono Kuncoro 2004) dalam mendefinisikan flypaper effect sebagai hasil pengamatan empirik bahwa bantuan tak bersyarat dari pemerintah pusat kepada daerah akan lekat (stick) pada daerah yang menerima transfer, dengan lain perkataan, fenomena flypaper effect secara umum membawa implikasi bahwa transfer akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri (Turnbull, 1998 haryono Kuncoro, 2004).

Fenomena *flypaper effect* dapat terjadi dalam dua versi (Gorodnichenko, 2001 dalam Haryono Kuncoro, 2004).

1. merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan.
2. mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah.

Flypaper Effect dapat dikelompokkan menjadi 2 aliran pemikiran Schwallie, 1989 dalam Haryono Kuncoro, 2004):

1. Birokratik (*bureaucratic model*)
   Model birokratik menelaah flypaper effect dari sudut pandang dari birokrat. Niskanen (1968 dalam Maimunah, 2006). Dalam pandangannya, posisi birokrat lebih kuat dalam pengambilan keputusan publik. Ia mengasumsikan birokrat berperilaku memaksimisasi anggaran sebagai

proksi kekuasaannya. Asumsi ini, kuantitas barang publik disediakan pada posisi biaya rata-rata sama dengan harganya. Pada posisi biaya marginal lebih tinggi daripada harganya, kuantitas barang publik menjadi tersedia terlalu banyak. Dengan demikian, transfer akan menurunkan harga barang publik sehingga memicu birokrat untuk membelanjakan lebih banyak anggaran.

Romer dan Rosenthal 1979 dalam Mutiara Maimunah 2006, menyatakan bahwa kelengketan (*stickiness*) dana transfer di daerah penerima merupakan akibat dari ketidakseimbangan kekuatan antara pemilih tengahan dengan birokrat daerah dalam pengambilan keputusan-keputusan publik. Romer dan Rosenthal mengistilahkan hal ini sebagai "tingkat pembalikan" (*reversion level*)

2. Ilusi fiskal (*fiscal illusion model*).

   Model ilusi fiskal mendasarkan kajiannya dari sudut pandang masyarakat yang mengalami keterbatasan informasi terhadap anggaran pemerintah daerahnya.

   Oates (1979, dalam Haryono Kuncoro, 2004) transfer akan menurunkan biaya rata-rata penyediaan barang/jasa publik bukan biaya marginalnya. Masyarakat tidak bisa membedakan penurunan biaya yang terjadi adalah biaya rata-ratanya ataukah biaya marginalnya. Masyarakat hanya percaya bahwa harga (biaya marginal penyediaan) barang/jasa publik akan menurun. Apabila permintaan akan barang/jasa publik tidak elastis (dan kondisi-kondisi yang lain tidak berubah), maka transfer akan berakibat pada kenaikan pajak bagi masyarakat setempat. Ini berarti pemerintah daerah mendapatkan keuntungan atas kelangkaan pengetahuan masyarakat guna melanjutkan agenda kenaikan pengeluarannya (Hewitt, 1986; O'Brien dan Shieh, 1990 dalam HaryonoKuncoro, 2004)

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi umum yang ditransfer oleh pemerintah pusat sebagai penutup kesenjangan antara kebutuhan fiskal dengan belanja yang dikeluarkan oleh sutu daerah otonom menimbulkan ketergantungan yang tinggi terhadap keuangan pusat, pendapatan dari pajak maupun sumber daya alam belum cukup signifikan menunjang belanja daerahnya. Pemerintah daerah yang menjadi masalah dalam pembuatan keputusan alokasi sumber daya adalah pemilihan kombinasi yang baik antara pajak daerah dan out put dalam pelayanan publik yang dibatasi aturan bahwa pengeluaran daerah plus surplus anggaran tidak melebihi grant dari pemerintah pusat, plus pajak daerah, dengan demikian dapat dilihat perbedaan dampak antara grant dan pendapatan (pajak) daerah terhadap perilaku fiskal dan belanja daerah. Belanja pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran, peningkatan alokasi transfer diikuti dengan penggalian Pendapatan Asli Daerah yang lebih tinggi hal ini disebabkan oleh respon overaktif dari pemerintah daerah terhadap arti pentingnya transfer.ada indikasi peningkatan belanja yang

tinggi tersebut disebabkan karena adanya inefisiensi belanja pemerintah daerah terutama belanja operasional

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu indikator akan ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat, di Indonesia rata rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang dari 20% terhadap belanja daerahnya. Kondisi ini menyulitkan pelaksanaan otonomi yang nyata di Indonesia, bantuan pemerintah pusat berpengaruh terhadap kemampuan daerah untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka menunjang pembelanjaannya.

Flypaper Effect Terhadap Belanja Daerah

Pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki, pemerintah daerah bisa merespon transfer dari pemerintah pusat secara simetris dan tidak simetris (Gamkhar & Oates, 1996 dalam Mutiara Maimunah, 2006). Beberapa peneliti menemukan bahwa respon Pemerintah Daerah berbeda untuk transfer dan pendapatan sendiri (seperti pajak). Artinya ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah terutama pajak daerah, ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer maka disebut *flypaper effect* (Oates,1999 dalam Haryono Kuncoro, 2004)

Besaran transfer akan signifikan mempengaruhi belanja daerah sebesar rata rata lebih dari 0,80 dan 1% pada masing masing belanja operasional dan belanja modal untuk setiap 1% kenaikannya, hal ini membuktikan bahwa telah terjadi *Flypaper Effect* pada dana tranfer

1. Fenomena *Flypaper Effect* ini terjadi apabila Belanja daerah yang di alokasikan lebih besar dari Dana Transfer dari pemerintah pusat
2. *Flypaper Effect* apabila penggunaan dana lebih besar dana Transfer dari pada Pendapatan Daerah
3. *Flypaper Effect* terjadi apabila belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah lebih besar dari dana transfer itu sendiri tanpa menjadi subtitut dari pendapatan daerah

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi Penelitian ini Laporan Keuangan Pemerintah di Madura yang terdiri dari empat Kabupaten dalam pelaporan tahunan hingga tahun 2007

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel random atau sampel acak, yaitu pemerintah di Madura dalam pelaporan Keuangan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, yang terdiri dari laporan Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer yaitu berupa pelaporan Keuangan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, yang terdiri dari laporan Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dinas atau instansi yang terkait yaitu laporan realisasi APBD Pemerintah di Madura

Definisi Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas satu variabel terikat yaitu Belanja Daerah (Y) dan dua variabel bebas yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) (X_1) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_1)

1. Variabel Terikat

Belanja Daerah (Y)

Belanja Daerah merupakan pengeluaran yang oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan pemerintahan diatasnya (pemerintah provinsi / pemprov dan pemerintah pusat)

2. Variabel Bebas (X)

a. Dana Alokasi Umum (DAU) (X_1)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pasal 1 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004).

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_2)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dalam sumber sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (Sabulon Sayang, 2005). Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 6)

Teknis Analisis

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda, karena jumlah variabel bebas (X) yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu variabel (X).

Data yang diperoleh selama periode penelitian diolah menggunakan alat bantu komputer dengan program SPSS.12.0 *for windows.* dengan model persamaan regresi, sebagai berikut

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

(Sumber : Sujianto, 2007 : 52)

Dimana :

Y : Belanja Daerah

X_1 : Dana Alokasi Umum (DAU)
X_2 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a : Konstanta
$\beta_{1,2}$: Koefisien regresi
e : Standart Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1: Hasil Pendugaan Parameter Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	-92759121457.143	8.0E+10
	Dana Alokasi Umum (DAU) (X1)	2.293	.386
	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X2)	-8.792	3.521

a. Dependent Variable: Belanja Daerah (Y)

Sumber : Lampiran. 3

Dari tabel 1 di atas dapat dibuat model persamaan regresi, sebagai berikut

$Y = -92.759.121.457,143 + 2,293\ X_1 - 8,792\ X_2$

Dari model persamaan regresi linier tersebut di atas, dapat diinterprestasikan, sebagai berikut :

Konstanta (a)

Nilai konstanta (a) **s**ebesar -92.759.121.457,143, menunjukkan bahwa, apabila variabel Dana Alokasi Umum (DAU) (X_1), dan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_2) konstan maka besarnya nilai variabel Belanja Daerah (Y) yaitu sebesar -92.759.121.457,143 satuan

Koefisien (B_1) Untuk Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) (X_1)

Besarnya nilai koefisien regresi (β_1) sebesar 2,293, nilai (β_1) yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Belanja Daerah (Y) dengan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) (X_1) yang artinya jika variabel Dana Alokasi Umum (DAU) (X_1) naik sebesar satu rupiah, maka besarnya nilai variabel Belanja Daerah (Y) akan naik sebesar 2,293 rupiah dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bersifat konstan

Koefisien (B_1) Untuk Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_2)

Besarnya nilai koefisien regresi (B_2) sebesar 8,792, nilai (B_2) yang negatif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Belanja Daerah (Y) dengan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_2), yang artinya jika variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_2), naik sebesar satu rupiah, maka besarnya nilai variabel Belanja Daerah (Y) akan turun sebesar 8,792 rupiah dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bersifat konstan

Tabel 2. : Hasil Analisis Varians Hubungan Secara Simultan

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.7920441566517E+23	2	8.96022E+22	28.543	.000[a]
	Residual	2.8253233937470E+22	9	3.13925E+21		
	Total	2.0745764960264E+23	11			

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X2), Dana Alokasi Umum (DAU) (X1)

b. Dependent Variable: Belanja Daerah (Y)

Sumber ; Lampiran. 3

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui besarnya nilai F hitung sebesar 28,543 lebih besar dari F tabel = 4,256 (Lampiran 6), dengan tingkat taraf signifikansi sebesar 0,00 (lebih kecil dari 0,05), sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, hal ini berarti kecocokan model Dana Alokasi Umum (DAU) (X_1) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (Y) pada Kabupaten di Madura.

Dari hasil pengujian dengan menggunakan alat bantu komputer dengan program SPSS.12.0, *For Windows* juga diperoleh nilai *R square* yang dapat disajikan dalam tabel 4.14 sebagai berikut:

Tabel. 3. : Koefisien Determinasi (R square / R^2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson (Autokorelasi)
1	.929[a]	.864	.834	56,028,994,416.05640	2.069

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X2), Dana Alokasi Umum (DAU) (X1)

b. Dependent Variable: Belanja Daerah (Y)

Sumber ; Lampiran. 3

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui besarnya nilai koefisien Determinasi (R *square* / R^2) sebesar 0,864, hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel Belanja Daerah (Y) pada Kabupaten di Madura, sebesar 86,4% dipengaruhi oleh variabel Dana Alokasi Umum (DAU) (X_1) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_2), sedangkan sisanya 13,6% dipengaruhi oleh faktor lain.

Uji Parsial / Uji t

Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) (X_1) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_2) secara parsial terhadap Belanja Daerah (Y) pada Kabupaten di Madura, digunakan Uji t.

Tabel 4: Hasil Analisis Varians Hubungan Secara Parsial

Variabel	t hitung	t table	Sig	Keterangan	Correlasi Parsial (r)	$(r)^2$
Dana Alokasi Umum (DAU) (X_1)	5.940	2,262	0,000	Berpengaruh	0.893	0.7974
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_2)	-2,497		0,034	Berpengaruh	-0.640	0.4096

Sumber ; Lampiran. 3 dan Lampiran. 7

Berdasarkan tabel di atas dapat diinterprestasikan, sebagai berikut :

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) (X_1) terhadap Belanja Daerah (Y)

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui besarnya nilai t hitung sebesar 5,940 lebih besar dari t tabel = 2,262, dengan tingkat taraf signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05), sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka hal ini berarti secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (Y).

Kontribusi yang diberikan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) (X_1) terhadap Belanja Daerah (Y), dapat dilihat pada *Correlation Partial* $(r)^2 = (0,893)^2 = 0,7974$, yang berarti bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) (X_1) mampu menjelaskan variabel Belanja Daerah (Y) sebesar 0,7974 atau sebesar 79,74 %

Hasil uji analisis yang dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten dimadura tercerminkan bahwa peran Dana Alokasi Umum berperan sangat signifikan dari pada Pendapatan Asli Daerah terhadap alokasi belanja yang dilakukan. Setiap transfer Dana Alokasi Umum yang diterima daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer Dana Alokasi Umum yang diterima daerah lebih besar (http://www.Balipost.co.id).

Terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja daerah. Jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja daerah dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja daerah, dari hal yang tercermin dalam alokasi ini mencerminkan kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah pada Kabupaten di Madura terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan dari Dana Alokasi Umum.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_2) terhadap Belanja Daerah (Y)

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui besarnya nilai t hitung sebesar -2,497 lebih kecil dari t tabel = -2,262, dengan tingkat taraf signifikansi sebesar 0,034 (lebih kecil dari 0,05), sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka hal ini berarti secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (Y).

Sedangkan untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_2) terhadap Belanja Daerah (Y), dapat dilihat pada *Correlation Partial* $(r)^2$ =

$(0,640)^2$ = 0,4096, yang berarti bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_2) mampu menjelaskan variabel Belanja Daerah (Y) sebesar 0,4096 atau sebesar 40,96 %

Hasil uji analisis yang dilakukan terhadap Kabupaten di Madura menunjukkan belum adanya kemandirian daerah khususnya dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah dimana besarannya hanya 40,96 % Hal ini mencerminkan Pemerintah Kabupaten di Madura belum mampu menggali sumber sumber keuangan lokal, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinsisiatif untuk lebih menggali potensi – potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah pada Kabupaten di Madura. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus berdampak pada perekonomian daerah (Saragih, 2003 dalam David Harianto dan Priyo Hari Adi). Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Bila yang terjadi sebaliknya, maka bisa diindikasikan adanya eksploitasi Pendapatan Asli Daerah terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan peningkatan produktifitas masyarakatit sendiri. Hal yang harus menjadi catatan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang sesungguhnya dalam mencapai kemandirian daerah pada Kabupaten di Madura bahwa keberhasilan peningkatan Pendapatan Asli Daerah hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Madura.

Berdasarkan hasil Uji Hipotesis dengan menggunakan Uji F dan Uji t dapat diketahui Bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) (X_1) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (Y), sehingga hipotesis 1 yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) (X_1) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (Y) pada Kabupaten di Madura, teruji kebenarannya.

Selanjutnya berdasarkan hasil Uji Hipotesis dengan menggunakan uji t juga dapat diketahui bahwa besarnya kontribusi yang diberikan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) (X_1) terhadap variabel Belanja Daerah (Y) yaitu sebesar 0,7974 atau sebesar 79,74 % > dari besarnya kontribusi yang diberikan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_2) yaitu sebesar 0,4096 atau sebesar 40,96 %, hal ini berarti telah terjadi *flypaper effect* dalam respon pemerintah daerah terhadap dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah, sehingga hipotesis 2 yang menyatakan bahwa terjadi *flypaper effect* pada

pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada Kabupaten di Madura, teruji kebenarannya. Dan berdasarkan data yang diperoleh mengenai belanja daerah (Lampiran 1) dapat diketahui bahwa selama tiga tahun berturut – turut besarnya nilai belanja daerah mengalami kenaikan, hal ini menunjukan bahwa *flypaper effect* cenderung menyebabkan peningkatan jumlah belanja daerah pada Kabupaten di Madura, sehingga hipotesis 3 yang menyatakan bahwa diduga *flypaper effect* cenderung menyebabkan peningkatan jumlah belanja daerah pada Kabupaten di Madura, teruji kebenarannya.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian membuktikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mempengaruhi Belanja Daerah pada Kabupaten di Madura, yang artinya semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Belanja Daerah pada Kabupaten di Madura juga akan tinggi, hal ini berarti bahwa Belanja Daerah (pengeluaran daerah) merupakan pengeluaran yang oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan pemerintahan diatasnya (pemerintah provinsi / pemprov dan pemerintah pusat), sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur tingkat Belanja Daerah

Dari hasil pengujian juga dapat diketahui bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, hal ini menunjukan bahwa perubahan yang terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU) akan mempengaruhi Belanja Daerah pada Kabupaten di Madura, yang artinya semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU), hal ini berarti bahwa kesenjangan yang terjadi pada dana transfer terbukti terjadi *flypaper effect* karena kenaikan Belanja Daerah pada Kabupaten di Madura juga akan tinggi, hal ini berarti bahwa Dana Alokasi umum yang ditransfer oleh pemerintah pusat sebagai penutup kesenjangan antara kebutuhan fiskal dengan belanja yang dikeluarkan oleh sutu daerah otonom menimbulkan ketergantungan yang tinggi terhadap keuangan pusat, pendapatan dari pajak maupun sumber daya alam belum cukup signifikan menunjang belanja daerahnya. Bagi pemrintah daerah yang menjadi masalah dalam pembuatan keputusan alokasi sumber daya adalah pemilihan kombinasi yang baik antara pajak daerah dan output dalam pelayanan publik yang dibatasi aturan bahwa pengeluaran daerah plus surplus anggaran tidak melebihi *grant* dari pemerintah pusat, plus pajak daerah. Dengan demikian dapat dilihat perbedaan dampak antara *grant* dan pendapatan (pajak) daerah terhadap perilaku fiskal dan belanja daerah. Belanja pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau

perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran, peningkatan alokasi transfer diikuti dengan penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi hal ini disebabkan oleh respon overaktif dari pemerintah daerah terhadap arti pentingnya transfer.ada indikasi peningkatan belanja yang tinggi tersebut disebabkan karena adanya inefisiensi belanja pemerintah daerah terutama belanja operasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur tingkat Belanja Daerah. Hasil penelitian yang dilakukan terbukti sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mutiara Maimunah yang memaparkan bahwa Dana Alokasi Umum yang lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah memicu timbulnya *flypaper effect.*

Penelitian yang dilakukan oleh Haryono Kuncoro yang menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang terjadi secara parsial menyebabkan perilaku yang berlebihan dalam membelanjakan Pendaptan daerah sehingga menimbulkan *flypaper effct* Selanjutnya hasil pengujian juga dapat dibuktikan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, hal ini menunjukan bahwa perubahan yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mempengaruhi Belanja Daerah pada Kabupaten di Madura, yang artinya semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Belanja Daerah pada Kabupaten di Madura juga akan tinggi, hal ini berarti bahwa kemampuan daerah untuk untuk membiayai sendiri anggaran pengeluaran rutin dan pembangunan merupakan salah satu tolak ukur utama dalam menilai kualitas otonomi daerah, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa semakin besar kontribusi PAD terhadap anggaran belanja daerah, maka kualitas otonomi daerah akan semakin tinggi. Di Indonesia rata rata PAD kurang dari 20% terhadap belanja daerahnya. Kondisi ini menyulitkan pelaksanaan otonomi yang nyata di Indonesia, bantuan pemerintah pusat berpengaruh terhadap kemampuan daerah untuk optimalisasi PAD dalam rangka menunjang pembelanjaannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur tingkat Belanja Daerah

Data yang digunakan dalam penelitian menunjukkan peningkatan belanja daerah selama tiga tahun dan peningkatan belanja hal ini membuktikan bahwa telah terjadi *flypaper effect* pada pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten di Madura.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Uji Hipotesis dengan menggunakan Uji F dan Uji t dapat diketahui Bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) (X_1) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (Y), sehingga hipotesis 1 yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) (X_1) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (Y) pada Kabupaten di Madura, teruji kebenarannya.

2. Selanjutnya berdasarkan hasil Uji Hipotesis dengan menggunakan uji t juga dapat diketahui bahwa besarnya kontribusi yang diberikan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) (X_1) terhadap variabel Belanja Daerah (Y) lebih besar dari besarnya kontribusi yang diberikan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_2), hal ini berarti telah terjadi *flypaper effect* dalam respon pemerintah daerah terhadap dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah, sehingga hipotesis 2 yang menyatakan bahwa terjadi *flypaper effect* pada pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada Kabupaten di Madura, teruji kebenarannya.
3. Berdasarkan data yang diperoleh mengenai belanja daerah (Lampiran 1) dapat diketahui bahwa selama tiga tahun berturut – turut besarnya nilai belanja daerah mengalami kenaikan, hal ini menunjukan bahwa *flypaper effect* cenderung menyebabkan peningkatan jumlah belanja daerah pada Kabupaten di Madura, sehingga hipotesis 3 yang menyatakan bahwa diduga *flypaper effect* cenderung menyebabkan peningkatan jumlah belanja daerah pada Kabupaten di Madura, teruji kebenarannya.

SARAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yaitu antara lain

1. Sangatlah penting di dalam melakukan perencanaan pembangunan suatu daerah, pemerintah hendaknya juga memperhatikan potensi dan kondisi regional suatu daerah, karena masing-masing daerah mempunyai keunggulan yang tidak sama. Dengan demikian penerapan teori basis ekonomi yang menekankan agar pembangunan suatu daerah diprioritaskan pada sector-sektor yang potensial merupakan salah satu alternatif untuk pengembangan sector yang ada.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat memasukkan aspek kebijakan publik, politik, mk dan lain lain yang berkaitan dengan belanja daerah sehingga diharapkan hasil penelitian yang diperoleh bisa lebih komprehensif
3. Agar memasukkan aspek perilaku Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki daerah serta memperhatikan efektifitas dan efesiensi pengunaan anggaran
4. Temuan temuan yang ada dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa pemberian Dana Alokasi Umum kepada daerah Kabupaten dan kota di Indonesia bukan hanya untuk menutup celah fiskal yang ada pada kemampuan keuangan daerah, namun menjadi sumber penerimaan utama untuk membiayai belanja. Rekomendasi bagi pemerintah daerah ke depan agar lebih mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan inovasi dan menggali potensi daerah di luar pajak, sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani dengan pajak dan Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan mampu membiayai belanja daerah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

_____, 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

_____, 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah

_____, 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

_____, 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah

_____, 2005, Peraturan Presien No. 7 Tahun 2005 Tentang Penetapan Tata Pemerintahan Yang Baik

_____, 2007, Peraturan Menteri dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Laporan APBD tahun 2008

_____, 2008, www. Bangkalan.go.id

_____, 2008, www. Sampang .go.id

_____, 2008, www. Pamekasan .go.id

_____, 2008, www. Sumenep .go.id

Abdullah Syukri dan Asmara Andra Jhon, 2006, Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah, Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.

Arfan Ikhsan & Muhammad Ishak, 2005, Akuntansi Keperilakuan, Penerbit Salemba Empat

Alhusin, Syahri, 2003, Aplikasi Statistik Praktis dengan SPSS. 10 for Windows, Edisi Revisi, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.

Arikunto, Suharsimi, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Diah Ayu Kusuma Dewi, 2006, Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum(DAU), Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia (Skripsi tidak di publikasikan, Universitas Islam Indonesia)

Firdaus, Muhamad, 2004, Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif, penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Gujarati, Damodar, 1995, Ekonometrika Dasar, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Haryo Kuncoro, Kajian Ekonomi Politik Pengaruh Transfer Antar Pemerintah pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, www.google.com

Haryo Kuncoro, 2007, Fenomena *Flypaper Effect* Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia, Simposium Nasional Akuntansi X

Husein, Umar, 2007, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mutiara Maimunah, 2006, *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Daerah (PAD), terhadap belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra, Simposium Nasional Akuntansi IX

Mardiasno , 2006, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Cetakan Pertama, Penerbit BPFE Yogyakarya

Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Salemba Empat, Yogyakarta.

Nazir, Mohamad, 2005, Metode Penelitian, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
Prambudi Tri Widodo, 2007, Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum(DAU), Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Bali (Skripsi tidak di Publikasikan, Universitas Islam Indonesia)
Kuncoro Mudrajad, Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal,2005
Khusaini, Mohammad, 2006, Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal Dan Pembangunan Daerah, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
Sabulon Sayang, 2005, Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah, (Tesis tidak dipublikasikan, Universitas Brawijaya Malang)
Santoso, Singgih, 2002, Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
Suparmoko, 2001, Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, penerbit PT ANDI Yogyakarta
Sumarsono, 2004, Metode Penelitian Akuntansi : Beserta Contoh Interprestasi Hasil Pengolahan Data, Edisi Revisi.
Sujianto, Eko Agus, 2007, Apliksi Statistik dengan SPSS untuk Pemula, Penerbit Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.